

PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BATU

Carmia Diahloka dan Sulih Indra Dewi

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: carmiadahloka@gmail.com, Sulih_d@yahoo.com

ABSTRACT

The more and more of poor communities in the urban area has changing lane of target direction when discussing about poverty. Urban poverty potentially become a source of social economic and social politic problems which can be fatal for society in a bigger scale. A qualitative method is used in this reseach based on reality in the field where a data collected by involved directly in the programme implementation. The result of this research showed that 1) Implementation of Raskin Programme in Batu barely having no difficulties, however there is still a lack of fund in Raskin distribution so regional government aiding a help through their APBD 2) expected role of the community will be very helpful for stimulation process in where at the same time boost empowerment of those poor community, 3) empowering process that happen in Raskin programme is showing a very healthy progress to combat poverty and giving a good impact to elevate their welfare and food self family.

Keywords : *poor communities, urban, Raskin Program.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh semua negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang yang umumnya disebabkan oleh keterbelakangan, minimnya pengembangan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki serta ketidatepatan strategi dan program pembangunan yang diterapkan.

Strategi yang bertumpu pada pertumbuhan terbukti mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi secara global, walaupun di sisi lain ternyata justru memperlebar adanya ketimpangan dan kemiskinan di kalangan masyarakat. Mekanisme *trickle down effect* dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi terbukti tidak bisa berjalann dengan semestinya karena keberadaan pembangunan dan industrialisasi tersebut justru menggeser dan menempatkan masyarakat kelas bawah pada posisi marjinal. Akibatnya, pembangunan yang diharapkan akan dapat memakmurkan dan mensejahterakan, malah identik denan penggusuran dan pengeliminasian terhadap sebagian anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pembangunan tersebut.

Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan mendorong beralihnya sasaran kajian tentang kemiskinan. Salah satu sebabnya adalah kemiskinan perkotaan potensial menjadi sumber masalah sosial ekonomi dan sosial politik yang relatif sulit diatasi dan dapat berakibat fatal bagi masyarakat dalam skala yang lebih luas. Fenomena kemiskinan di kota dipicu oleh perkembangan kota yang makin pesat (perluasan wilayah kota, tingginya tingkat urbanisasi, meningkatnya perkembangan ekonomi, yang ditandai dengan adanya konsentrasi berbagai macam kegiatan ekonomi terutama industri, jasa modern, dan perdagangan dalam skala besar).

Masalah yang timbul akibat urbanisasi antara lain masalah sosial seperti meningkatnya kriminalitas dan kenakalan remaja, langkanya lapangan kerja, rendahnya kualitas perumahan dan tingkat pencemaran air, tanah serta udara yang tinggi. Urbanisasi biasanya melahirkan kaum proletar perkotaan dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah dan terbatas. Jurang yang lebar antara pelaku ekonomi yang berhasil dan yang tidak telah memunculkan kantong-kantong kawasan perumahan yang miskin dan kumuh di dalam kota (Daldjoeni,1992)..

Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lainnya yang dinilai lebih tinggi, dengan kata lain pembangunan menyangkut proses perbaikan (Katz & Seera dalam Tjokrowinoto, 1995). Terdapat lima paradigma pembangunan yang berkembang, yaitu *economic growth*, *welfare*, *neo economy*, *structuralize* dan *humanizing*. Dari kelima paradigma tersebut yang kerap diterapkan hanya tiga, yakni pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan yang berpusat pada manusia.

People centered development (pembangunan berpusat pada manusia) berwawasan lebih jauh daripada sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial bagi masyarakat. Peningkatan perkembangan dan kesejahteraan manusia, persamaan dan *sustainability* manusia menjadi fokus sentral proses pembangunan, pelaksanaan pembangunan yang menentukan tujuan, sumber pengawasan dan untuk mengarahkan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka (Gran dalam Tjokrowinoto, 1995).

Dalam kaitan ini konsep pembangunan manusia menjadi relevan. Menurut perspektif UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk, yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dalam upaya tersebut. Konsep pembangunan ini lebih luas daripada konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pembangunan sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari sejauh mana kinerja suatu negara dalam bidang pembangunan manusia. Indikator yang digunakan untuk mengukurnya antara lain: 1) Indeks Mutu Hidup, 2) Indeks Pembangunan Manusia, dan 3) Indeks Kemiskinan Manusia. (Sarman & Sayogyo, 2000).

Sebagai derivasi logis dari pembangunan yang berpusat pada manusia, Korten (dalam Tjokrowinoto, 1995) mengemukakan perlunya pembangunan pendekatan *community based resources management* (pengelolaan sumber daya yang bertumpu pada komunitas) dengan ciri sebagai berikut: (1) Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri (*bottom up*). (2) Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka; (3) Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya sifatnya amat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal, (4) Adanya penekanan pada proses *social learning* yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar; (5) Proses pembentukan jaringan (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber daya dan untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal dan horizontal.

Kemiskinan dan Upaya Penanggulangannya

Kemiskinan seringkali didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 2000). Namun persoalannya sebenarnya tidak sesederhana itu, karena kemiskinan bersifat multikompleks dan multidimensi karena antara lain berkaitan dengan kesejahteraan sosial, akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan serta terhadap perlindungan hukum dan hak-hak politik. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi kemiskinan paling tidak digunakan dua pendekatan, yang pertama menekankan pada pengertian substansi, yaitu *substansive poverty*, sedangkan yang kedua memahami kemiskinan dalam pengertian relatif yakni kemiskinan *relative deprivation* (Mas’oed, 1999).

Pendekatan subsistensi menganggap bahwa kemiskinan adalah persoalan ketidakmampuan memperoleh tingkat penghasilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan, sandang dan beberapa kebutuhan pokok lainnya, dengan kata lain disebut dengan istilah lain yaitu ‘kemiskinan absolut’. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut/jumlah pendapatannya tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum. *Kemiskinan relatif* adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan

yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya (Kartasmita, 1996).

Proses kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dapat dipahami berdasarkan penyebabnya yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah/natural timbul akibat kelangkaan sumber daya alam, seperti tanah yang tandus, tidak adanya pengairan dan kelangkaan prasarana lainnya. Sedangkan kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh munculnya kelembagaan yang membuat anggota masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata (Mas'ood, 1999).

Bila dikaji lebih lanjut, hubungan antara kemiskinan dengan berbagai faktor penyebabnya dan dampak yang diakibatkan merupakan suatu mata rantai yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yang lazim dikenal sebagai "*viscious circle of poverty*" Chamber (1998) menyebut lingkaran setan kemiskinan ini sebagai 'perangkap kemiskinan/ *deprivation trap*. Chambers mengemukakan ada lima ketidakberuntungan yang melingkari orang miskin, yakni kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterisolasian, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kelima hal ini yang mendasari konsep "Kemiskinan Terpadu (*Integrated Poverty*) dalam memahami dan memecahkan masalah kemiskinan dalam masyarakat.

Sedangkan kriteria yang digunakan oleh BPS untuk mengukur garis kemiskinan adalah pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada tahun 1993, angka pengeluaran minimum sebagai batas garis kemiskinan absolut tersebut ditetapkan rata-rata sebesar Rp.27.905,- per kapita per bulan untuk daerah perkotaan dan Rp.18.244,- untuk daerah pedesaan (Kartasmita, 1996).

Kemiskinan penduduk kota memang tidak tepat diukur dari makanan, apalagi dengan penghasilan sebesar Rp.27.905,- per orang per bulan. Pedagang asongan atau pemulung yang berpenghasilan Rp. 5.000,- per hari jelas tidak dapat dikategorikan miskin, karena mereka tidak hanya bisa makan tiga kali sehari, tetapi juga mampu membeli makanan kecil dari para pedagang setiap hari. Isu kemiskinan di perkotaan sebenarnya adalah seberapa banyak penghasilan itu digunakan untuk konsumsi bila dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan papan, pakaian, pendidikan anak, pemeliharaan kesehatan dan kegiatan produksi. Dengan pendapatan yang relatif kecil, mereka harus mengikuti irama "dinamika" hadi perkotaan, ditambah lagi dengan keharusan untuk mentransfer sebagian dari pendapatan mereka ke desa untuk mencukupi kebutuhan yang ditinggal (Suman dan Yustika, 1997).

Kemiskinan di perkotaan bisa juga diakibatkan oleh kebijakan pembangunan, sehingga dapat diartikan sebagai kemiskinan struktural. Secara rinci terdapat enam kelompok masyarakat miskin di perkotaan (Abimanyu, 1997) yaitu (a) kelompok fakir miskin, (b) kelompok informal, (c) kelompok tani dan nelayan, (d) kelompok pekerja kasar, (e) kelompok pegawai negeri sipil dan ABRI, dan (f) kelompok pengangguran. Baik di perkotaan maupun pedesaan kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multidimensional karena kenyataannya juga berkaitan dengan persoalan-persoalan non ekonomi (sosial, budaya dan politik).

Nugroho (dalam Dewantara et.al, 1999) mengemukakan beberapa dimensi yang terkait dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya. Kedua, kemiskinan berdimensi sosial budaya, dimana lapisan yang secara ekonomis akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yg disebut dengan budaya kemiskinan, dapat ditunjukkan dengan nilai-nilai apatis, fatalistik, dan ketidakberdayaan. Sedangkan ketiga, kemiskinan berdimensi struktural atau politik, artinya orang yang mengalami kemiskinan struktural atau politis, yang terjadi karena orang tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik atau tidak memiliki kekuatan politik. Sehingga, kemiskinan akan dapat diatasi bila berbagai hambatan yang sifatnya struktural dan politis bisa dihilangkan.

Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Untuk memerangi kemiskinan secara frontal di semua sektor, diperlukan upaya yang memihak, memberi perlindungan dan bukan sekedar persamaan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya / membiarkan masyarakat miskin itu meminta sendiri jaringan-jaringan sosial dan kemampuannya untuk

dapat memperkuat posisi tawar mereka. Beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat selain memberi peluang kepada masyarakat miskin untuk mengurus diri sendiri, guna menopang kesuksesan pengentasan kemiskinan antara lain adalah: 1) investasi pelayanan masyarakat dalam bidang infrastruktur fisik dan sosial, 2) kebijakan pemerintah yang menguntungkan masyarakat miskin, 3) penyediaan teknologi bagi masyarakat miskin, 4) lembaga yang efektif yang mampu menumbuhkan sinergi dalam kerja yang meliputi jaringan kerja instansi pemerintah, BUMN/BUMD, koperasi, pengusaha swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga lokal kemasyarakatan (Esman dan Uphoff dalam Dewanta, 1995).

Adapun strategi pembangunan untuk mengurangi tingkat kemiskinan antara lain: 1) mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga ada pentransferan sumber dana pembangunan dari pusat ke daerah, 2) mempermudah lapisan sosial miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan sosial, 3) penyediaan fasilitas kredit untuk masyarakat miskin, 4) pembangunan infrastruktur ekonomi dan 5) pengembangan kelembagaan (Tjokrowinoto dalam Dewanta, 1999).

Konsep Pemberdayaan

Konsep mengenai model dan strategi yang populer disebut *empowerment* diperkenalkan oleh Friedmaan (1992). Konsep pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Dalam prakteknya, Friedmann (1992) menyatakan proses pemberdayaan dilakukan melalui beberapa pentahapan yang dimulai dengan pemberdayaan individu, dilanjutkan pemberdayaan ikatan antar individu/kelompok, dan terakhir pemberdayaan politik. Langkah-langkah praktis yang dilakukan dalam pemberdayaan individu antara lain pemberdayaan waktu dengan mengurangi pemborosan waktu saat memenuhi kebutuhan dasar, pemberdayaan psikologis untuk membangun keyakinan diri tiap individu dan pemberdayaan usaha ekonomi yang mengarah pada terbentuknya jaringan usaha antara anggota keluarga, anggota masyarakat hingga terkait dengan ekonomi pasar, dan langkah terakhir yaitu pemberdayaan politik yang dimaksudkan untuk membentuk mobilisasi dan saling keterkaitan antara kekuatan negara, ekonomi, dan kekuatan sosial sampai di tingkat pedesaan. Melalui pemberdayaan politik ini diharapkan masyarakat memiliki kekuatan tawar menawar dalam menentukan kebijakan pembangunan yang paling sesuai baginya.

Dengan demikian untuk mencapai suatu masyarakat yang berdaya perlu adanya pemihakan kepada pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan secara langsung pada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan maksud agar dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti. Penelitian ini dilakukan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo kota Batu.

Fokus penelitian dijabarkan sebagai : a) proses penyelenggaraan Program Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN) di kota Batu dan b) peran masyarakat Kota Batu dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin di Kota Batu melalui program RASKIN.

Sumber data utama dari penelitian ini diambil lewat *key informan* : Kepala Kantor Departemen Sosial beserta aparat lain dan tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang terlibat dalam program RASKIN, *peristiwa* : peristiwa yang diobservasi dikemukakan pada teknik pengumpulan data, dan *dokumen* : manografi Kota Batu, catatan-catatan dari Dinas Sosial termasuk Juklak program RASKIN, tabel-tabel dan lain sebagainya.

Proses pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap: 1) proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), 2) pada saat berada di lokasi penelitian (*getting along*), 3) mengumpulkan data (*logging*

the data) guna memperoleh data yang menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi langsung dan teknik dokumentasi.

Dalam penelitian ini digunakan analisa data kualitatif dari Miles dan Huberman (1992) dengan prosedur sebagai berikut: a) reduksi data, b) penyajian data, c) menarik kesimpulan atau verifikasi.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria-kriteria : derajat kepercayaan (*credibility*), derajat keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Apabila dalam pemeriksaan ternyata menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut dapat memenuhi kriteria yang diharapkan, maka hasil penelitian ini dapat dikatakan valid dan ketergantungan pada kehandalan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk sebagai pemekaran kecamatan Batu dari Kabupaten Malang. Kota dengan luas wilayah sekitar 9.514 Ha, saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pengevaluasian proyek-proyek pembangunan secara mandiri sehingga masyarakat di wilayah tersebut semakin meningkat kesejahteraannya. Secara umum kota Batu merupakan daerah pegunungan yang terletak \pm 800 m di atas permukaan air laut dengan suhu $17^{\circ}\text{C} - 25,6^{\circ}\text{C}$.

Jumlah penduduk kota Batu adalah 159.617 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 79.542 jiwa (49,83 %) dan jumlah penduduk perempuan 80.075 jiwa (50,17 %). Diantara tiga kecamatan di Kota Batu, Kecamatan Batu mempunyai jumlah penduduk terbanyak sedangkan kecamatan Junrejo memiliki jumlah penduduk terkecil.

Proses Penyelenggaraan Program Beras RASKIN di Kota Batu

Pemilihan dilakukan dengan mengacu kepada data dari BKKBN yang dimusyawarahkan di tingkat kelurahan/Desa dengan melibatkan Lurah, BPD, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Keluarga Miskin atau Institusi Kemasyarakatan Lainnya yang ada di daerah tersebut. Hasil pemilihan keluarga dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara musyawarah desa yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat setempat.

Dalam rangka meningkatkan transparansi maka daftar nama keluarga penerima manfaat yang sudah disahkan dipasang pada papan pengumuman Kelurahan agar dapat diketahui masyarakat luas. Jumlah keluarga penerima dilaporkan secara berjenjang ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi untuk mengetahui rincian jumlah keluarga sasaran.

Atas dasar pagu alokasi tahun 2004 per kabupaten/Kota yang ditetapkan Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan pagu kuantum beras tahun 2004 per kecamatan dan per titik distribusi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Titik distribusi ditentukan berdasarkan kesepakatan tertulis Pemda setempat dengan Perum Bulog/Divre/Subdivre. Titik distribusi dilengkapi petugas distribusi, sarana dan prasarana penunjang distribusi untuk menunjang kelancaran penyerahan beras dari Satgas RASKIN kepada Pelaksana Distribusi Akhir dan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemda. Petugas distribusi ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah. Camat bertugas untuk membantu kelancaran proses penerimaan dan pembagian beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, pembayaran serta penyelesaian administrasinya.

Pelaksana distribusi akhir adalah KaDes/Lurah dibantu oleh aparat bawahannya yang disahkan oleh Bupati / Walikota yg bertugas mendistribusikan beras RASKIN kepada keluarga sasaran dgn disaksikan wakil masyarakat, apabila diperlukan. Kinerja pelaksanaan RASKIN sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-masing instansi diikut berdasarkan tetap sasaran, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat administrasi.

Mekanisme dan Distribusi dan Administrasi

Bupati/Walikota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) RASKIN kepada KaDivre berdasarkan alokasi beras per kelurahan/desa. Berdasarkan SPA tersebut Kadivre menerbitkan

SPPB/DO Beras per kecamatan kepada satgas RASKIN. SPA bulan tertentu yang belum dilayani, apabila akan dialokasikan kembali pada bulan tertentu dengan/tanpa perubahan dapat dilayani kembali, kecuali ada perubahan lokasi sehingga akan diterbitkan SPA baru dengan merujuk pada SPA lama. Satgas RASKIN mengangkut dan menyerahkan beras kepada pelaksana Distribusi Akhir di Titik Distribusi. Penyerahan beras oleh Satgas RASKIN ke pelaksana Distribusi di titik distribusi harus dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) yang dibuat saat penyerahan, ditandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi dengan nama dan identitas jelas dicap/stempel.

Pelaksanaan pendistribusian beras RASKIN kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Mekanisme distribusi secara lebih rinci diatur dalam Juknis Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kondisi obyektif masing-masing daerah. Dalam hal pagu alokasi tingkat kabupaten/kota tidak mencukupi kebutuhan KK miskin sasaran maka pengaturan alokasi bulannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah masing-masing.

Untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pencapaian tujuan pelaksanaan program RASKIN secara menyeluruh dapat dilakukan evaluasi oleh Tim Independen dengan melibatkan unsur masyarakat, perguruan tinggi atau institusi kemasyarakatan setempat secara periodik. Evaluasi dilakukan oleh tim Supervisi dan Pengendali RASKIN di tingkat pusat, maupun oleh tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RASKIN di tingkat daerah.

Sosialisasi program RASKIN bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program RASKIN kepada keluarga Sasaran Penerima Manfaat, masyarakat umum dan instansi penanggung jawab sesuai tingkatan wilayahnya. Pelaksanaan sosialisasi di tingkat pusat dan tingkat daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Program RASKIN yang disosialisasikan meliputi mekanisme distribusi RASKIN, pemahaman tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing instansi serta hak dan kewajiban keluarga Sasaran Penerima Manfaat, mekanisme pembayaran, serta mekanisme penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui RASKIN, pola pendekatan yang bersifat *proyek pembangunan* digantikan oleh *pembangunan yang partisipatif*. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam rangkaian kegiatan program RASKIN, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan perolehan hasil. Keterlibatan masyarakat dalam rangkaian kegiatan tersebut dinyatakan dalam bentuk perhatian, keikutsertaan dalam kelompok pendistribusian serta dalam pengawasan atau memonitoring pelaksanaan kegiatan proyek.

Keterlibatan pemerintah yang hanya sebatas memantau dan memberikan legalitas semakin membuka peluang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dan menggali potensi dan partisipasinya. Minimnya keterlibatan pemerintah ini secara implisit menunjukkan adanya dukungan dan keberpihakan pemerintah terhadap proses pemberdayaan, dimana pemerintah hanya bersifat sebagai katalis atau penyedia fasilitas yang diperlukan bagi proses pemberdayaan dalam komunitas masyarakat.

Proses Pemberdayaan Dalam Kerangka Program RASKIN di Kota Batu

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan harus memiliki beberapa persyaratan pokok, antara lain : 1) kegiatan yang dilaksanakan harus terarah/menguntungkan masyarakat yang tertinggal, 2) pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang akan dilakukan, 3) karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri, upaya pemberdayaan masyarakat harus berkaitan dengan pengembangan kegiatan usaha bersama (kooperatif) dalam kelompok yang dapat dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal, dan terakhir, menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial.

Pelaksanaan program RASKIN di kota Batu menunjukkan suatu pendekatan yang intensif dan komprehensif yang dilakukan baik oleh fasilitator kelurahan, kecamatan dan kota Batu serta Perguruan Tinggi, untuk menstimulir dan memotivasi keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam program RASKIN. Bila hal tersebut terwujud, maka masyarakat akan kuat dan berdaya dan secara ekonomi maupun sosial.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program RASKIN di Kota Batu tidak banyak mengalami kendala, bahkan untuk menutup kekurangan dana dalam pendistribusian RASKIN sampai bulan Desember 2004 dibantu pemerintah daerah melalui APBD.
2. Dampak yang diharapkan dari masyarakat sudah mulai dirasakan walaupun belum banyak tampak nyata bagi proses stimulasi serta mendorong terciptanya peningkatan keberdayaan bagi masyarakat miskin penerima RASKIN.
3. Proses pemberdayaan yang berlangsung dalam program RASKIN menunjukkan kemajuan positif bagi penanggulangan kemiskinan serta dampak pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan rumah tangga. .

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, et.al.1997. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*. Yogyakarta. PAU-SE UGM & BPFE UGM.
- Dewanta, A.S.et.al.1999. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Kartasasmita, G.1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta.
- Mas' oed M.1999. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sarman, M & Sayogyo, 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*. Ind-Hills Co., Jakarta.
- Suman A & Yustika, AE. 1997. *Perspektif Baru Pembangunan Indonesia*. PT. Danar Brawijaya, Malang.
- Tjokrowinoto, M. 1995.*Politik Pembangunan*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.